



Media Title	Koran Tempo
Date	4 Agustus 2014
Section	News
Page No	23
Journalist	Feri Firmansyah
Frequency	Daily

## Harap Cemas Proyek Tol Andalas

Pembangunan tol Sumatera terjegal penolakan Dipo Alam.

**Fery Firmansyah**

*fery\_f@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Tingginya volume kendaraan tanpa dibarengi infrastruktur yang memadai memperkuat desakan atas pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah memberi kepastian mengenai pembangunan jalan penghubung Pulau Andalas ini.

Sofjan pun pesimistis proyek ini berjalan dalam waktu dekat. Sebab, umur pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tersisa beberapa bulan. Jika sisa waktu itu gagal dimanfaatkan, "Bukan tidak mungkin skema pembiayaan proyek ini diubah lagi oleh pemerintah mendatang," kata dia kepada *Tempo*.

Padahal, kata Sofjan, proyek jalan tol Sumatera bisa mendatangkan beberapa keuntungan. Dua di antaranya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ongkos logistik. Jalan ini pun memfasilitasi perdagangan komoditas penting, seperti kelapa sawit, batu bara, dan bahan tambang lain yang dihasilkan di Sumatera.

Desakan mengenai pembangunan jalan tol ini juga diutarakan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Bangka-Belitung, beberapa waktu yang lalu. Ketua Forum Gubernur se-Sumatera, Gatot Pujo Nugroho, mengatakan jalan tol ini penting untuk kawasan Sumatera, yang menyumbang pendapatan 25,5 persen terhadap keuangan negara.

Jalan tol trans-Sumatera sebetulnya sudah lama dirancang. Namun proyek dengan modal lebih dari Rp 200 triliun ini tak laku saat ditenderkan karena kurang menguntungkan pihak swasta. Karena itu, pemerintah menunjuk PT Hutama Karya sebagai pengembang, dan direncanakan mendapat penyertaan modal negara (PMN).

Awalnya, pembangunan jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada September 2013 dengan PMN Rp 2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. Meskipun anggaran sudah diketok, Dewan Perwakilan Rakyat tiba-tiba membatalkan pencairannya dengan alasan belum dibahas di komisi terkait. Penyertaan modal kembali diajukan dalam APBN-P 2014. Sayangnya, pengajuan yang kedua ini kembali ditolak parlemen.

Seorang pejabat pemerintah yang mengikuti pembahasan proyek ini sejak awal mengatakan pihak yang menolak penggunaan PMN sebenarnya bukan DPR, melainkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dengan alasan ingin "mengamankan" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari masalah hukum, Dipo meminta agar pembangunan jalan tol Sumatera tidak menggunakan uang negara. Akhirnya, rencana pemasangan tiang pancang pada 2013 urung dilakukan.

Saat dimintai konfirmasi, Dipo Alam mengakui bahwa dia tidak setuju dengan penggunaan uang negara

untuk pembangunan tol Sumatera. "Pemerintah tak ada uang, dan kami harus hati-hati," katanya.

Kini, pemerintah menggagas solusi lain. Dalam rapat koordinasi infrastruktur Juni lalu, pemerintah memastikan empat dari 23 ruas segera dibangun dalam tahap pertama. Skema pembiayaan pun diubah. Skema PMN untuk Hutama Karya kini diganti pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Suntikan modal Rp 11 triliun digunakan untuk penguatan aset Hutama Karya agar lebih leluasa mengajukan pinjaman.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan perubahan skema ini merupakan jalan tengah setelah PMN ditolak Dipo Alam. "Yang penting proyek bisa jalan," katanya. Chairul yakin, jika proyek ini jadi, dalam sepuluh tahun akan laku dijual. "Setelah jadi, jangan dioperasikan Hutama Karya. Langsung dijual, dan untungnya akan berkali lipat," katanya. Setelah dijual, Hutama Karya dapat melunasi utangnya dan membangun ruas yang lain.

● ANGGA BUKMA WILAJA

Selengkapnya, baca majalah *Tempo* edisi Senin, 4 Agustus 2014.